



Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Faksimile (0274) 586712
Website: www.bapeda.jogjaprov.go.id e-mail : bappeda@jogjaprov.go.id KodePos 55213

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Keputusan Gubernur DIY Nomor 416/KEP/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Tahun 2022;

5. Peraturan Gubernur No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Register Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Register Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan di dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Februari 2022

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Tembusan:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/01123/2022
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

**DAFTAR NAMA SUB KEGIATAN, SASARAN SUB KEGIATAN UTAMA
(CORE-BUSINESS) DAN PEMILIK RESIKO**

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PEMILIK RESIKO
1.	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Fasilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027 : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
2.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah : 1 dokumen 2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah : 1 dokumen 2. Dokumen RKPD 2023 sbg dasar penyusunan KUA PPAS : 1 Dokumen 3. Dokumen RKPDP 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP : 1 Dokumen 4. Fasilitasi penyusunan Renja : 1 Dokumen 5. Fasilitasi penyusunan Renstra : 1 Dokumen 6. Dokumen naskah akademik RPJMD : 1 Dokumen 7. Pengembangan Jogjaplan : 1 Aplikasi	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan
4.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1. Penyerahan DIPA APBN Tahun 2023 : 1 dokumen 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022 : 1 dokumen 3. Laporan Kinerja APBN (dekon/TP) triwulan IV/2021 dan Triwulan I-III/2022 : 4 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PEMILIK RESIKO
5.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kab/Kota Tahun 2022 : 1 dokumen 2. Evaluasi SAKIP Pemda DIY : 2 kegiatan 3. Dokumen LKPJ DIY Tahun 2021 : 1 dokumen 4. Dokumen LKPJ AMJ DIY Tahun 2017-2022 : 1 dokumen 5. Laporan evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2021 : 1 dokumen 6. Laporan evaluasi Hasil Renja OPD DIY Semester II/Tahun 2021 dan Semester I/2022 : 2 dokumen 7. Laporan evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021 : 1 dokumen 8. Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/ 2021 dan Semester I/2022 : 2 dokumen 9. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2021 : 1 dokumen 10. Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan : 1 dokumen 11. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV / Tahun 2021 dan TW I-III 2022 : 4 dokumen 12. Updating Sengguh Tahun 2022 : 1 aplikasi 	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan
6.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Semester II/2021 dan Semester I/2022 : 2 dokumen 2. Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab / Kota Tahun 2021 : 1 dokumen 	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen 3. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan 	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PEMILIK RESIKO
		Subbidang Pemerintahan Umum : 1 dokumen 4. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik : 1 dokumen	
8.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2021 : 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2021 : 1 dokumen 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2022 : 1 dokumen 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2022 : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik
9.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 : 1 dokumen 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 : 1 dokumen 3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM : 1 dokumen 4. Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat : 1 dokumen 5. Dokumen Rencana Sinkronisasi Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat
10.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2021 : 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 :	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PEMILIK RESIKO
	Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	
		3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2022 : 1 dokumen 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 : 1 dokumen 5. Dokumen evaluasi CSR/TSLP : 1 dokumen 6. Dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY : 1 dokumen 7. Dokumen Monev TPB DIY : 1 dokumen 8. Pengembangan aplikasi sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan : 1 aplikasi	
11.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen 3. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha : 1 dokumen 4. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha
12.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2021 : 1 dokumen 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021 : 1 dokumen 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022 : 1 dokumen 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022 : 1 dokumen 5. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2021 : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PEMILIK RESIKO
13.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 : 1 dokumen 2. Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral
14.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2021. : 1 dokumen 2. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022 : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral
15.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 : 1 dokumen 2. Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan : 1 dokumen 3. Dokumen KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan
16.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 : 1 dokumen 2. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 : 1 dokumen 3. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 : 1 dokumen	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan
17.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpula, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	1. Dokumen Analisis ICOR Sektor DIY sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan : 1 dokumen 2. Dokumen Analisis Makro Ekonomi sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan : 1	Kepala Seksi Data dan Statistik

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PEMILIK RESIKO
		dokumen 3. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian : 1 dokumen 4. Penyediaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian : 1 dokumen 5. Update Aplikasi Jogja Dataku : 1 aplikasi 6. Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik : 1 paket 7. Pengumpulan dan Penyajian Data Geospasial : 1 paket 8. Fasilitasi Satu Data Indonesia: Dokumen Proyeksi Data : 1 dokumen	
18.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1. Dokumen hasil penelitian dengan tema sosial : Ketimpangan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota : 1 dokumen	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan
19.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1. Dokumen Hasil Penelitian dengan Tema Budaya : Menuju DIY sebagai Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara : 1 dokumen	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan
20.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1. Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2022 : 1 dokumen 2. Rekomendasi Hasil Penelitian Tahun 2022 : 1 dokumen 3. Laporan Monitoring Evaluasi Kelitbangan Tahun 2022 : 1 dokumen 4. Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan : 1 dokumen 5. Publikasi Prosiding Ilmiah : 100 eksemplar	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Tembusan:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 01123 / 2022
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

REGISTER RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DI
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

REGISTER RESIKO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY TAHUN 2022

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen sinkronisasi perencanaan tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/Tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	Data OPD Bidang Sektoral Bappeda belum terkompilasi dengan baik	R.1	Penyampaian data n+2 sebagai bahan penyusunan dokumen bahan perencanaan 2023 dari Bidang Sektoral Bappeda terlambat	Dokumen bahan perencanaan 2023 Bidang Perencanaan Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan tidak tersusun tepat waktu	C	Menyampaikan kepada Bidang Sektoral Bappeda agar lebih awal dalam menyiapkan dan mengkompilasi data yang diperlukan dengan baik	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan Bidang Sektoral Bappeda terkait dengan ketersediaan dan kompilasi data yang diperlukan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen sinkronisasi perencanaan tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/Tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	Masih terdapatnya permasalahan leadership dan faktor politis	R.2	Di setiap tingkatan wilayah memiliki fokus masing-masing dan masih kuatnya ego sektoral serta adanya faktor politis	Belum optimalnya hasil pembangunan karena tidak selarasnya perencanaan pembangunan N+1 di level pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota)	C	Melakukan pemantauan kontribusi dan alokasi atas kegiatan yang bersifat mendukung tematik, lintas sektor dan kewilayah serta pusat daerah pada tahap penyusunan dokumen Perencanaan Provinsi.	3	4	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan pemantauan kontribusi dan alokasi atas kegiatan yang bersifat mendukung tematik, lintas sektor dan kewilayah serta pusat daerah pada tahap penyusunan dokumen Perencanaan baik di Provinsi maupun Kabupaten-Kota.	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
3	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen sinkronisasi perencanaan tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	Data belum terkompilasi oleh masing-masing OPD Mitra Bidang Sektoral Bappeda	R.3	Penyampaian Data dari Bidang Sektoral Bappeda sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 belum tersusun sesuai jadwal	Dokumen bahan perencanaan Bidang Perencanaan Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan tidak sesuai jadwal	C	Menyampaikan kepada Bidang Sektoral Bappeda agar menyiapkan rencana kerja tahun n+2 lebih awal dan terintegrasi ke perencanaan masing-masing bidang yang saling terkait	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan Bidang Sektoral Bappeda terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
4	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen sinkronisasi perencanaan tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	Perencanaan pembangunan belum diselenggarakan antar sektor dan kewilayahan	R.4	Belum ada pegangan untuk dapat mengarahkan bagi sektor dan kewilayahan untuk merencanakan tahapan perencanaan tahun N+2 nantinya	Belum ada arah kebijakan perencanaan untuk sinkronisasi lintas wilayah dan lintas sektor untuk tahun N+2 Perencanaan	C	Merumuskan dan mengkoordinasikan hasil arah kebijakan perencanaan untuk Tahun N+2 diawal tahun perencanaan (N) Provinsi.	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Merumuskan dan mengkoordinasikan hasil arah kebijakan perencanaan untuk Tahun N+2 diawal tahun perencanaan (N) Provinsi dan Kabupaten-Kota.	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
5	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Fasilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027	Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik di pusat maupun daerah	R.5	Perubahan Kebijakan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Visi dan Misi Gubernur tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada Bidang Sektoral dan tenaga ahli agar menyiapkan bahan lebih awal	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan bidang sektoral dan tenaga ahli terkait pengolahan data yang terintegrasi	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
6	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Fasilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027	Perencanaan di internal Bidang Sektoral dan tenaga ahli belum terintegrasi secara optimal	R.6	Penyampaian Data dari Bidang Sektoral Bappeda dan tenaga ahli sebagai bahan penyusunan Visi dan Misi Gubernur belum optimal dalam mengatasi permasalahan yang menjadi isu	Kualitas dokumen bahan penyiapan Visi dan Misi Gubernur belum tersusun secara optimal	C	Menyampaikan kepada Bidang Sektoral dan tenaga ahli agar mengkompilasi data yang diperlukan dengan baik	3	4	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Menyusun dokumen perencanaan berdasarkan data yang kompil dan mempertimbangkan berbagai kondisi	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik di pusat maupun daerah	R.1	Perubahan Kebijakan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, rentan selesai tidak tepat waktu	C	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Berkoordinasi secara intensif sejak awal perencanaan dengan pihak terkait sehingga dapat diambil langkah-langkah alternatif terbaik	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
8	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Masing-masing sektor menyusun perencanaan sesuai kepentingan masing-masing	R.2	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, belum optimal kualitasnya	C	Melakukan koordinasi dan sinergi secara intensif antar sektor	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Sejak awal proses perencanaan berkoordinasi dan bersinergi secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
9	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen naskah akademik RPJMD	Keterbatasan data/dokumen referensi	R.3	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa konsultansi	Dokumen naskah akademik RPJMD tidak selesai tepat waktu	C	Melakukan koordinasi berkaitan dengan pembahasan naskah akademik RPJMD	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Berkoordinasi sejak awal dengan pihak penyedia dan secara berkala melakukan pertemuan untuk progress pekerjaan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
10	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen RKPD 2023 sebagai dasar penyusunan KUA PPAS	Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik di pusat maupun daerah	R.4	Perubahan Kebijakan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	C	Melakukan koordinasi TAPD dan Pemerintah Pusat untuk merespon kebijakan yang diberikan	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Menyusun dokumen perencanaan berdasarkan data yang lengkap dan mempertimbangkan berbagai kondisi baik tingkat Pusat maupun Daerah	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
11	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen RKPD 2023 sebagai dasar penyusunan KUA PPAS	Masing-masing sektor menyusun perencanaan sesuai kepentingan masing-masing	R.5	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	Penyusunan Dokumen RKPD, belum optimal kualitasnya	C	Melakukan koordinasi dan sinergi secara intensif antar sektor	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Sejak awal proses perencanaan berkoordinasi dan bersinergi secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
12	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen RKPD 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik di pusat maupun daerah	R.6	Perubahan Kebijakan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Dokumen RKPD, rentan selesai tidak tepat waktu sesuai peraturan perundangan	C	Melakukan koordinasi TAPD dan Pemerintah Pusat untuk merespon kebijakan yang diberikan	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Menyusun dokumen perencanaan berdasarkan data yang komplit dan mempertimbangkan berbagai kondisi baik tingkat Pusat maupun Daerah	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
13	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen RKPDP 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	Masing-masing sektor menyusun perencanaan sesuai kepentingan masing-masing	R.7	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	Penyusunan Dokumen RKPDP, belum optimal kualitasnya	C	Melakukan koordinasi dan sinergi secara intensif antar sektor	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Sejak awal proses perencanaan berkoordinasi dan bersinergi secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
14	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Fasilitasi Penyusunan Renja	Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik di pusat maupun daerah	R.8	Adanya ruang politik yang memungkinkan fasilitasi penyusunan Renja menjadi lebih lama	Fasilitasi penyusunan Renja rentan selesai tepat waktu dan berkualitas	C	Melakukan koordinasi berkaitan dengan pembahasan Renja	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Berkoordinasi sejak awal perencanaan sehingga masing-masing pihak dapat mengawal proses perencanaan dengan baik	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
15	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Fasilitasi Penyusunan Renstra	Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik di pusat maupun daerah	R.9	Adanya ruang politik yang memungkinkan fasilitasi penyusunan Renstra menjadi lebih lama	Fasilitasi penyusunan Renstra rentan selesai tidak tepat waktu dan berkualitas	C	Melakukan koordinasi berkaitan dengan pembahasan Renstra	4	3	12	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Berkoordinasi sejak awal perencanaan sehingga masing-masing pihak dapat mengawal proses perencanaan dengan baik	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN
16	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Pengembangan Jogjaplan	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran atau kurangnya peserta yang lolos kualifikasi	R.10	Metode pengadaan melalui lelang memungkinkan terjadinya keterlambatan pada saat proses pengadaan	Pengembangan Aplikasi Jogjaplan rentan mengalami keterlambatan	C	Melakukan pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundangan dan berkoordinasi dengan ULP	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan ULP sehingga proses pengadaan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
17	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Penyerahan DIPA APBN Tahun 2023	Koordinasi teknis pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait terhambat	R.7	Kesiapan materi dan sarana pendukung terlambat	Terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan bersumber dana dari DIPA APBN	C	Menjalin komunikasi informal dengan Kanwil DJPb wilayah DIY	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Penyusunan jadwal serta pembagian tugas, penyiapan materi, dan koordinasi sedini mungkin	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	November - pertengahan Desember 2020
18	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2022	Editing dan penyelarasan draft akhir dokumen PK terlambatFinalisasi draft Pergub terlambat	R.5	Pengajuan dan permohonan tanda tangan dokumen PK ke Gubernur terlambat	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Perubahan DIY Tahun 2022 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan data APBD terbaru	C	Plotting jadwal dengan memperhatikan load pekerjaan bidang pengendalian	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan identifikasi terhadap peraturan yang sudah ada, penyiapan draft, dan koordinasi dengan pengampu kepentingan terkait	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	Oktober 2022
19	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur DIY Tahun 2022	Editing dan penyelarasan draft akhir dokumen PK terlambat	R.4	Pengajuan dan permohonan tanda tangan dokumen PK ke Gubernur terlambat	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur DIY Tahun 2022 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	C	Penugasan personil sebagai penanggungjawab penyusunan dokumen PK	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Pembuatan SPT penanggungjawab materi, koordinasi penyusunan, serta identifikasi ketersediaan data sejak awal	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	Pertengahan Januari 2022
20	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Laporan Kinerja APBN TW IV (2021) dan TW I - III (2022)	Editing dan penyelarasan draft akhir terlambat	R.6	Keterlambatan proses cetak buku laporan Kinerja APBN	Laporan Kinerja APBN TW IV (2021) dan TW I - III (2022) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tidak tepat waktu	C	Koordinasi dengan personil pelaksana	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Pembagian tugas penyusunan laporan dan validasi/klarifikasi keterisian data di sistem pelaporan	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	Paling lambat 1 bulan setelah triwulan ybs berakhir
21	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2021	Editing dan penyelarasan draft akhir terlambat	R.3	Keterlambatan proses cetak buku laporan EKPD Tahun 2021	Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 tidak tepat waktu, sehingga tidak bisa dipergunakan sebagai masukan untuk perencanaan	C	Koordinasi dengan tenaga ahli sedini mungkin	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Koordinasi dan penyiapan KAK sejak awal serta cek dan recheck pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga ahli	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	Akhir Desember 2022

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi SAKIP Pemda DIY	Editing dan penyeselaran draft akhir terlambat serta analisis yang dilakukan kurang sesuai	R.1	Keterlambatan penyelesaian dokumen Laporan Akuntabilitas serta hasil analisis yang tidak akurat	Dokumen Laporan Akuntabilitas Pemda DIY Tahun 2021 terlambat dikirim ke Pemerintah Pusat dan tidak mencerminkan kinerja riil	C	Penyusunan SPT penanggungjawab materi di internal Bappeda DIY	3	5	15	SANGAT TINGGI	HINDARI RISIKONYA	Pembuatan SPT penanggungjawab materi dan <i>run down</i> jadwal penyusunan yang disepakati semua pihak, serta koordinasi sejak awal terkait data dukung capaian (baik kelengkapan maupun validitasnya)	1	4	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	Minggu terakhir Maret 2022
23	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKPJ Pemda DIY Tahun 2021	Data tidak akurat sehingga finalisasi materi terlambat masuk ke percetakan	R.2	Keterlambatan proses cetak buku LKPJ	Substansi kurang lengkap dan Dokumen LKPJ Gubernur DIY Tahun 2021 terlambat dikirim ke DPRD	C	Koordinasi penyiapan materi sedini mungkin	3	5	15	SANGAT TINGGI	HINDARI RISIKONYA	Pembuatan SPT penanggungjawab materi sejak awal, <i>run down</i> jadwal penyusunan dokumen LKPJ Gubernur, pengarahan pimpinan kepada OPD serta optimalisasi fungsi verifikator data	1	4	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	Pertengahan Maret 2022
24	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKPJ AMJ Gubernur 2017-2022	Data tidak akurat sehingga finalisasi materi terlambat masuk ke percetakan	R.8	Keterlambatan proses cetak buku LKPJ	Substansi kurang lengkap dan Dokumen LKPJ AMJ 2017-2022 Gubernur DIY Tahun 2021 terlambat dikirim ke DPRD	C	Plotting jadwal dengan memperhatikan load pekerjaan bidang pengendalian	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Penyiapan materi, pengadaan penyedia jasa sejak awal, dan koordinasi sedini mungkin, serta penyiapan KAK yang berkualitas	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	April 2020

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
25	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Hasil RKPDIY	Realisasi capaian memerlukan analisa yang mendalam khususnya terkait pengaruh pandemi dan tingkat koordinasi internal pada level OPD yang cukup dinamis/beragam	R.1	Keterisian data/informasi yang memadai dari OPD masih belum lengkap, sekedar diisi, atau kurang berkualitas pada aspek analisisnya	Dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPDIY Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Membuat list OPD yang sudah dan belum mengentri kemudian menindaklanjuti dengan koordinasi baik di grup monev/ surat pemberitahuan secara formal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
26	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil evaluasi Program pemda	Koordinasi dengan berbagai pihak dan monev di lapangan memakan waktu yang cukup signifikan untuk dapat mengetahui akar permasalahan & peluang solusi yg diharapkan	R.2	Progres pelaporan program pemda sangat kompleks dengan cakupan materi yang memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk pihak eksternal	Dokumen laporan hasil evaluasi program Pemda tahun 2020 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi dan penentuan skala prioritas terhadap jumlah program pemda yang ditangani	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
27	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY	OPD memerlukan waktu analisa terhadap capaian kinerja setiap triwulan	R.3	Sistem yang tersedia belum menyajikan informasi yang cukup memadai	Dokumen laporan evaluasi hasil renja OPD DIY tahun 2020 dan tahun 2021 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Membuat list OPD yang sudah dan belum mengentri kemudian menindaklanjuti dengan koordinasi baik di grup monev/ surat pemberitahuan secara formal	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
28	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021	Masih terdapat OPD yang mengumpulkan evaluasi hasil renstra melebihi batas waktu yang sudah ditentukan	R.4	Analisa ketercapaian hasil RENSTRA OPD memerlukan waktu yang cukup panjang	Dokumen laporan evaluasi hasil RENSTRA OPD DIY tahun 2020 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Membuat list OPD yang belum mengirimkan laporan evaluasi hasil renstra melalui Bapak Sekda dan merancang sistem pelaporan melalui IT	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
29	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil evaluasi RPJMD DIY	Ketersediaan data realisasi capaian RPJMD terus mengalami updating terkait rilis eksternal yang tidak sama dalam hal waktu ekspose data tetap	R.6	Penyusunan dokumen laporan memerlukan waktu yang lebih lama, TERKAIT dengan capaian kinerja per level sebagaimana cascading yang sangat kompleks	Capaian otcome/impact dalam RPJMD selalu berubah sehingga waktu penyelesaian terlambat	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Memberikan surat permohonan kepada instansi eksternal terkait realisasi capaian dan berkoordinasi dengan UPT BPPSD	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
30	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan	Memerlukan kerjasama lintas bidang dalam mengetahui proses penyusunan RKPDIY yang dikordinir oleh bidang yang berbeda	R.8	Penyelesaian laporan sangat tergantung pada proses penyusunan RKPDIY yang dikordinir oleh bidang yang berbeda (bidang perencanaan)	Dokumen laporan evaluasi kebijakan perencanaan tahunan tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan nota dinas terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif dengan bidang perencanaan	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Membuat list terkait tahapan penyusunan RKPDIY sebagaimana regulasi	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
31	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah TW IV 2021	Materi laporan masih belum berkualitas atau memerlukan pendalaman pasca desk berkaitan dengan ragam capaian yang final maupun sementara	R.9	Finalisasi laporan terlambat terkait dengan analisa capaian kinerja eselon II maupun III	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah triwulan IV 2021 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu pengentrian jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Membuat list atau jadwal pelaksanaan desk hingga target cetak yang disusun jauh-jauh hari dan melakukan koordinasi berkala dengan pimpinan	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
32	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah TW I-III 2022	Materi laporan masih belum berkualitas atau memerlukan pendalaman pasca desk	R.10	Finalisasi laporan terlambat terkait dengan persetujuan pimpinan terhadap analisa informasi	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah triwulan I-III 2022 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu pengentrian jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Membuat list OPD yang sudah dan belum mengentri kemudian menindaklanjuti dengan koordinasi baik di grup monev/ surat pemberitahuan secara formal	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
33	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Update monev/web Sengguh	Finalisasi laporan terlambat terkait dengan persetujuan pimpinan terhadap analisa informasi	R.11	Gangguan sistem/bugs tidak teratasi/data tidak optimal karena sejumlah faktor eksternal seperti kebijakan Pemerintah	Aplikasi Sengguh tidak berfungsi optimal	C	Melakukan updating aplikasi sesuai kebutuhan pengembangan dan regulasi	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pengembang dan pemerintah pusat terkait perkembangan peraturan terkait	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
34	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota	Kualitas laporan dari kab/Kota sangat bervariasi meskipun sudah diberi standar sesuai regulasi	R.5	Analisa laporan evaluasi hasil RKPD Kab/Kota memerlukan waktu yang cukup signifikan	Dokumen laporan evaluasi hasil RKPD Kab/Kota tahun 2020 dan tahun 2021 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu pengentrian jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Membuat list OPD yang sudah dan belum mengentri kemudian menindaklanjuti dengan koordinasi baik di grup monev/ surat pemberitahuan secara formal	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN
35	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021	Ragam capaian RPJMD kab/kota yang sangat kompleks, berkaitan adanya perbedaan periodisasi RPJMD kabupaten/kota dan kepentingan politik lokal dalam pencantuman indikator	R.7	Penyusunan dokumen laporan memerlukan proses yang cukup lama karena harus membandingkan capaian dalam perspektif kepentingan Pemda DIY	Dokumen laporan evaluasi hasil RPJMD Kab/Kota tahun 2019 tidak selesai tepat waktu	C	Mengedarkan surat edaran terkait tenggat waktu penyampaian laporan jauh-jauh hari dan koordinasi yang intensif	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Membuat list Pemkab/Pemkot yang sudah dan belum mengumpulkan laporan dengan rentang waktu pengumpulan waktu tertentu dan koordinasi melalui grup WA	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	Data dukung dan informasi untuk perencanaan belum tersedia secara lengkap	R.1	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Subbidang Pemerintahan Umum yang tidak efisien	Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023 serta Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak tepat waktu	C	Mendokumentasikan bahan-bahan perencanaan	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Membuat database digital bahan-bahan perencanaan yang terintegrasi	1	1	1	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	1 TAHUN ANGGARAN
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	Data primer tidak tersedia pada tahun N dan data sekunder belum diolah oleh OPD Mitra Subbid Pemerintahan Umum	R.2	Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen perencanaan	Kualitas dokumen perencanaan Subbidang Pemerintahan Umum tidak sesuai target yang diharapkan	C	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Pemerintahan Umum	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	1 TAHUN ANGGARAN
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum	Dinamika Perubahan SDM Subbidang Pemerintahan Umum	R.3	Waktu yang tidak efisien dalam koordinasi proses penyusunan dokumen bahan perencanaan tahun 2024	Dokumen bahan perencanaan 2024 tidak tepat waktu	C	Menginformasikan secara intensif batas akhir pengumpulan dokumen evaluasi capaian program kepada OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Memberikan punishment kepada OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum yang terlambat mengumpulkan Dokumen Evaluasi Capaian Program Tahun 2019	1	2	2	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	1 TAHUN ANGGARAN
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum	Kurangnya koordinasi antar OPD Mitra Subbid Pemerintahan Umum	R.4	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	Kualitas dokumen perencanaan Subbidang Pemerintahan Umum tidak sesuai target yang diharapkan	C	Koordinasi internal secara intensif	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Pembagian tugas secara proporsional sesuai kompetensi	1	2	2	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	1 TAHUN ANGGARAN
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2021	Kurangnya koordinasi internal dalam OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum dalam menyusun dokumen evaluasi capaian Program Tahun 2021	R.5	OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Terlambat Mengumpulkan Dokumen Evaluasi Capaian Program Tahun 2021	Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2021 Tidak Tepat Waktu	C	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Pemerintahan Umum	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2022	Kurangnya koordinasi internal dalam OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum dalam menyusun dokumen hasil monitoring capaian Program Tahun 2022	R.6	OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum Terlambat Mengumpulkan Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program Tahun 2022	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2022 Tidak Tepat Waktu	C	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Pemerintahan Umum	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	Data dukung dan informasi untuk perencanaan belum tersedia secara lengkap	R.1	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Subbidang Administrasi Publik yang tidak efisien	Dokumen bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023 serta Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak tepat waktu	C	Mendokumentasikan bahan-bahan perencanaan	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Membuat database digital bahan-bahan perencanaan yang terintegrasi	1	1	1	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik	ANGGARAN
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	Data primer tidak tersedia pada tahun N dan data sekunder belum diolah oleh OPD Mitra Subbid Administrasi Publik	R.2	Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen perencanaan	Kualitas dokumen perencanaan Subbidang Administrasi Publik tidak sesuai target yang diharapkan	C	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Administrasi Publik	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik	1 TAHUN ANGGARAN
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik	Dinamika Perubahan SDM Subbidang Administrasi Publik	R.3	Waktu yang tidak efisien dalam koordinasi proses penyusunan dokumen bahan perencanaan tahun 2024	Dokumen bahan perencanaan 2024 tidak tepat waktu	C	Menginformasikan secara intensif batas akhir pengumpulan dokumen evaluasi capaian program kepada OPD mitra Subbidang Administrasi Publik	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Memberikan punishment kepada OPD mitra Subbidang Administrasi Publik yang terlambat mengumpulkan Dokumen Evaluasi Capaian Program Tahun 2019	1	2	2	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik	1 TAHUN ANGGARAN
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik	Kurangnya koordinasi antar OPD Mitra Subbid Administrasi Publik	R.4	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	Kualitas dokumen perencanaan Subbidang Administrasi Publik tidak sesuai target yang diharapkan	C	Koordinasi internal secara intensif	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Pembagian tugas secara proporsional sesuai kompetensi	1	2	2	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik	1 TAHUN ANGGARAN
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2021	Kurangnya koordinasi internal dalam OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik dalam menyusun dokumen evaluasi capaian Program Tahun 2021	R.5	OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik Terlambat Mengumpulkan Dokumen Evaluasi Capaian Program Tahun 2021	Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2021 Tidak Tepat Waktu	C	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Administrasi Publik	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2022	Kurangnya koordinasi internal dalam OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik dalam menyusun dokumen hasil monitoring capaian Program Tahun 2022	R.6	OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik Terlambat Mengumpulkan Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program Tahun 2022	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2022 Tidak Tepat Waktu	C	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Administrasi Publik	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	Data belum terkompilasi oleh masing-masing OPD Mitra Subbidang SDM	R.1	Penyampaian Data Rencana Kerja (tahun n+1 dan Renja Perubahan tahun n) dari OPD mitra sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan Subbidang SDM tidak sesuai jadwal	Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan data yang diperlukan	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia	1 TAHUN ANGGARAN
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	Data primer masih menggunakan data tahun sebelumnya dan sekunder dari OPD kurang valid	R.2	Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen perencanaan	...kualitas dokumen perencanaan Subbidang SDM tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra Subbid SDM	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	1	1	1	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia	1 TAHUN ANGGARAN
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM	Data OPD Mitra Subbidang SDM tidak terkompilasi dengan baik	R.4	Penyampaian data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan 2024 dari OPD mitra Subbidang SDM terlambat	Dokumen perencanaan Tahun 2024 tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan rencana kerja tahun n+2	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia	1 TAHUN ANGGARAN
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDMkurangnya integrasi peran OPD Mitra Subbidang SDM dengan Tenaga Ahli	R.5	...belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	...kualitas dokumen perencanaan Subbidang SDM tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra Subbid SDM	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	1	1	1	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia	1 TAHUN ANGGARAN
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM Tahun 2021	Hasil pengolahan data capaian program melalui monitoring dan evaluasi dari OPD Mitra terlambat	R.3	Data capaian program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Subbidang SDM terlambat disampaikan	Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang SDM tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang telah ditentukan	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi n-1	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2022	Hasil pengolahan data capaian program melalui monitoring dan monitoring dari OPD Mitra terlambat	R.6	Data capaian program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen monitoring capaian program OPD Mitra Subbidang SDM terlambat disampaikan	Dokumen monitoring capaian program OPD mitra Subbidang SDM tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang telah ditentukan	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan hasil monitoring	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	Data belum terkompilasi oleh masing-masing OPD Mitra Subbidang Kesra	R.1	Penyampaian Data Rencana Kerja (tahun n+1 dan Renja Perubahan tahun n) dari OPD mitra sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan Subbidang Kesra tidak sesuai jadwal	Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan data yang diperlukan	3	3	9	Tinggi	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	Data primer masih menggunakan data tahun sebelumnya dan sekunder dari OPD kurang valid	R.2	Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen perencanaan	kualitas dokumen perencanaan Subbidang Kesra tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra Subbid Kesra	3	3	9	Tinggi	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	1	1	1	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesra	Data OPD Mitra Subbidang Kesra tidak terkompilasi dengan baik	R.4	Penyampaian data tahun 2019 dan 2020 sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan 2022 dari OPD mitra Subbidang Kesra terlambat	Dokumen perencanaan Tahun 2022 tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan rencana kerja tahun n+2	3	3	9	Tinggi	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesrakurangnya integrasi peran OPD Mitra Subbidang Kesra dengan Tenaga Ahli	R.4	...belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasialkualitas dokumen perencanaan Subbidang Kesra tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra Subbid Kesra	3	3	9	Tinggi	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Sinkronisasi Rencana Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda	Data bahan Sinkronisasi Program CSR/TSLP tidak akurat	R.4	Data bahan Sinkronisasi CSR/TSLP tidak tepat waktu	Data Sinkronisasi Program CSR/TSLP tidak tepat waktu	C	Melakukan perencanaan sesuai prosedur dan tatakala waktu pengadaan	3	3	9	Tinggi	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Meningkatkan komunikasi intensif dengan mitra OPD dan mitra kerja	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen evaluasi CSR/TSLP	Data Bahan Dokumen Evaluasi CSR/TSLP tidak tepat waktu	R.5	Data Bahan Dokumen Evaluasi CSR/TSLP terlambat terkumpul	Dokumen evaluasi CSR/TSLP tersusun	C	Melakukan rapat berkala dan himbauan mengenai pelaporan pada perusahaan dalam forum	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Meningkatkan komunikasi intensif dan penegakan komitmen dengan perusahaan pengurus dan anggota forum CSR	1	1	1	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen evaluasi penanggulangan kemiskinan DIY	Data bahan Dokumen Evaluasi penanggulangan kemiskinan DIY yang berasal dari Eksternal tidak tepat waktu	R.6	Data bahan Dokumen Evaluasi penanggulangan kemiskinan DIY tidak akurat	Dokumen Evaluasi penanggulangan kemiskinan DIY terlambat tersusun	C	Melakukan rapat berkala mengenai penanggulangan kemiskinan	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Meningkatkan komunikasi intensif dan penegakan komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dengan segena stakeholder penanggulangan kemiskinan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen movev TPB / SDGs DIY	Data Capaian SDGs DIY dari Stakeholder (OPD, instansi Vertikal, Non Pemerintah, Kab Kota dan Akademisi) tidak tepat waktu	R.7	Data Capaian SDGs DIY dari Stakeholder (OPD, instansi Vertikal, Non Pemerintah, Kab Kota dan Akademisi) tidak terkumpul	Dokumen movev TPB/SDGs DIY terlambat tersusun	C	Melakukan rapat berkala mengenai evaluasi SDGs TPB DIY	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Meningkatkan komunikasi intensif dan penegakan komitmen pelaksanaan RAD SDGs dengan stakeholder movev SDGs baik pihak OPD, Pemerintah Kab Kota, instansi vertikal, non Pemerintah, akademisi, filantropi, media, dll	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	updating data kemiskinan sebagai Data Bahan Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) tidak dilakukan oleh kabupaten/kota secara komprehensif	R.8	Data yang akan diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) tidak dilakukan updating sesuai regulasi	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) tidak akurat	UC	Melakukan rapat berkala mengenai SIMNANGKIS	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Meningkatkan komunikasi intensif dengan pengembang aplikasi dan entitas sumber data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
63	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Subbidang Kesra Tahun 2021	Data pada OPD tidak terkompilasi dengan baik	R.3	Data n-1 sebagai bahan evaluasi dari OPD mitra Subid Kesra terlambat disampaikan	Dokumen Evaluasi Tahun 2021 tidak tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang telah ditentukan	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi n-1	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesra tahun 2022	Hasil pengolahan data capaian program melalui monitoring dan monitoring dari OPD Mitra terlambat	R.9	Data capaian program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen monitoring capaian program OPD Mitra Subbidang Kesra terlambat disampaikan	Dokumen monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Kesra tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang telah ditentukan	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan hasil monitoring	2	2	4	RENDAH	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNGJ AWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
65	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dunia Usaha Sebagai Bahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dunia Usaha	Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022Data belum terkompilasi oleh masing-masing OPD Mitra Subbid Dunia Usaha	R.1	...Penyampaian Data Rencana Kerja (tahun n+1 dan Renja Perubahan tahun n) dari OPD mitra sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan Subbid Dunia Usaha tidak sesuai jadwal	dokumen perencanaan Subbidang Dunia Usaha tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan dan mengkompilasi data yang diperlukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha	1 TAHUN ANGGARAN
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dunia Usaha	Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022Data primer menggunakan data tahun sebelumnya dan sekunder dari OPD kurang valid	R.2	...Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen perencanaankualitas dokumen perencanaan Subbidang Dunia Usaha tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid dunia usaha	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha	1 TAHUN ANGGARAN
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dunia Usaha	Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Dunia UsahaData OPD Mitra Subbid Dunia Usaha tidak terkompilasi dengan baik	R.4Penyampaian data tahun 2021 dan 2022 sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan 2024 dari OPD mitra Subbid Dunia Usaha terlambatdokumen perencanaan Tahun 2022 tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar dalam menyiapkan rencana kerja tahun n+2 lebih awal	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha	1 TAHUN ANGGARAN
68	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dunia Usaha	Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usahakurangnya integrasi peran OPD Mitra Subbid Dunia Usaha	R.5	...belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasialkualitas dokumen perencanaan Subbidang Dunia Usaha tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid dunia usaha	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha	1 TAHUN ANGGARAN
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Dunia Usaha	Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2021hasil pengolahan data capaian program melalui monitoring dan evaluasi dari OPD Mitra terlambat	R.3	...Penyampaian data capaian program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Subbid Dunia Usaha terlambatdokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Dunia Usaha tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui movev sesuai jadwal yang ditentukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi terkait hasil evaluasi evaluasi capaian program dan kegiatan melalui movev secara kontinyu dengan OPD mitra	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha	1 TAHUN ANGGARAN
70	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Dunia Usaha	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022hasil pengolahan data capaian program melalui monitoring dan evaluasi dari OPD Mitra terlambat	R.6Penyampaian data capaian program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Subbid Dunia Usaha tahun 2022 terlambatdokumenDokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid dunia usaha	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan stakeholder terkait pertumbuhan ekonomi inklusi	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
71	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pertanian dan Kelautan	Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	...Data belum terkompilasi oleh masing-masing OPD Mitra Subbid Pertanian dan Kelautan	R.1	...Penyampaian Data Rencana Kerja (tahun n+1 dan Renja Perubahan tahun n) dari OPD mitra sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan Subbid Pertanian dan Kelautan tidak sesuai jadwal	dokumen perencanaan Subbidang Pertanian dan Kelautan tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan data yang diperlukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	SUBBID Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
72	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pertanian dan Kelautan	Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	...Data primer menggunakan data tahun sebelumnya dan sekunder dari OPD kurang valid	R.2	...Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen perencanaan	...kualitas dokumen perencanaan Subbidang Pertanian dan Kelautan tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Pertanian dan Kelautan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
73	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pertanian dan Kelautan	Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Subbid Dunia Usaha tidak terkompilasi dengan baik Kelautan	...Data OPD Mitra Subbid Dunia Usaha tidak terkompilasi dengan baik	R.5	...Penyampaian data tahun 2021 dan 2022 sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan 2024 dari OPD mitra Subbid Dunia Usaha terlambat	...dokumen perencanaan tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar dalam menyiapkan rencana kerja tahun n+2 lebih awal	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
74	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pertanian dan Kelautan	Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Subbid Dunia Usaha tidak terkompilasi dengan baik Kelautan	...kurangnya integrasi peran OPD Mitra Subbid Pertanian dan Kelautan	R.6	...belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	...kualitas dokumen perencanaan Subbidang Pertanian dan Kelautan tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Pertanian dan Kelautan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
75	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pertanian dan Kelautan	Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra melalui monitoring dan evaluasi dari OPD Mitra terlambat	...hasil pengolahan data capaian program melalui monitoring dan evaluasi dari OPD Mitra terlambat	R.3	...Penyampaian data capaian program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Subbid Pertanian dan Kelautan terlambat	...dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pertanian dan Kelautan tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang ditentukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi terkait hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev secara kontinyu dengan OPD mitra	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
76	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pertanian dan Kelautan	Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021	...Data primer menggunakan data tahun sebelumnya dan sekunder dari OPD kurang valid	R.4	...Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen evaluasi	...kualitas dokumen evaluasi Subbidang Pertanian dan Kelautan tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Pertanian dan Kelautan terkait verifikasi data	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi terkait hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev secara kontinyu dengan OPD mitra	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
77	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pertanian dan Kelautan	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022hasil pengolahan data capaian program melalui monitoring dan evaluasi dari OPD Mitra terlambat	Penyampaian data capaian program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Subbid Pertanian dan Kelautan tahun 2022 terlambatdokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022 tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang ditentukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan stakeholder terkait tahun berjalan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
78	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pertanian dan Kelautan	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022Data primer menggunakan data tahun sebelumnya dan dan sekunder dari OPD kurang valid		...Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen evaluasikualitas dokumen evaluasi Subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022 tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid Pertanian dan Kelautan terkait verifikasi data	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan stakeholder terkait tahun berjalan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
79	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pertanian dan Kelautan	Dokumen hasil monev RAD-PG 2021data yang dimiliki OPD dan instansi Tim Monev RADPG belum lengkap terkompilasi dalam satu dokumen data	keterlambatan update data OPD dan instansi Tim Monev RADPG untuk mendukung penyusunan dokumen Monev RADPGdokumen hasil monev RAD-PG 2019 tidak selesai tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD dan instansi lain Tim Monev RAD-PG agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang ditentukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan stakeholder terkait evaluasi	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Subtansi Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN
80	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pertanian dan Kelautan	Dokumen hasil monev RAD-PG 2021Data primer menggunakan data tahun sebelumnya dan dan sekunder dari OPD dan instansi lain kurang valid		...Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan dokumen Monev RADPGkualitas dokumen hasil monev RAD-PG 2021 tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan instansi lain Tim Monev RAD-PG terkait verifikasi data	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan stakeholder terkait evaluasi	3	2	6	SEDANG	SUBBID Pertanian dan Kelautan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
81	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM sebagai masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	Data pada OPD tidak terupdate dengan baik	R.1	Data Rencana Kerja (tahun n+1) dan (Rencana Perubahan tahun n) OPD mitra sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dari OPD mitra Subid PIWESDM terlambat disampaikan	Tidak akuratnya penyajian data dalam penyusunan Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM sebagai masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 karena menggunakan data sementara	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan dan mengkompilasi data yang diperlukan sebagai bahan perencanaan.	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait menyiapkan dan kompilasi data yang diperlukan sebagai bahan perencanaan.	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral	1 TAHUN ANGGARAN
82	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	Cara pandang perencanaan program dan kegiatan pada masing-masing sektor masih ego sektoral	R.2	Kurangnya pemahaman OPD masing-masing sektor di subid PIWESDM baik di level provinsi maupun kabupaten kota dalam hal integrasi program dan kegiatan secara holistik.	Kualitas dokumen perencanaan Subbidang PIWESDM tidak sesuai target yang diharapkan	C	'Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan rencana kerja tahun	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait menyiapkan dan kompilasi data yang diperlukan sebagai bahan perencanaan.	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral	2 TAHUN ANGGARAN
83	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2021.	Hasil monitoring dan evaluasi OPD terlambat disusun	R.4	Data capaian program dan kegiatan tahun n-2 sebagai bahan penyusunan Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2021 terlambat disampaikan	Tidak tersedianya Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2021 dengan data dukung terupdate.	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil monev sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral	1 TAHUN ANGGARAN
84	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022	Hasil monitoring capaian program tahun 2022 OPD terlambat disusun	R.5	Hasil monitoring capaian program tahun 2022 OPD terlambat disusun sebagai bahan penyusunan Dokumen monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022 terlambat disampaikan	Tidak tersedianya Dokumen monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022 terlambat disampaikan	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil monev sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tepat waktu.	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	melakukan koordinasi dan komunikasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNGJAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
85	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022Data belum terkompilasi oleh masing-masing OPD Mitra Subbid PTRLHK	R.1Penyampaian Data Rencana Kerja (tahun n+1 dan Renja Perubahan tahun n) dari OPD Mitra sebagai bahan penyusunan dokumen bahan perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbid PTRLHK tidak sesuai jadwalDokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak dapat tersusun tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar lebih awal dalam menyiapkan dan mengkompilasi data yang diperlukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN
86	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022Data yang saling terkait antar bidang sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan belum terintegrasi di OPD Mitra Subbid PTRLHK	R.2Penyampaian Data Rencana Kerja (tahun n+1 dan Renja Perubahan tahun n) dari OPD Mitra sebagai bahan penyusunan dokumen bahan perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang PTRLHK belum menggunakan data terupdatekualitas dokumen bahan perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang PTRLHK sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak sesuai target yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid pertanian dan kelautan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait dengan ketersediaan data	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN
87	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan KehutananData OPD Mitra Subbidang PTRLHK belum terkompilasi dengan baik	R.3Penyampaian data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen bahan perencanaan 2024 dari OPD Mitra Subbidang PTRLHK terlambatDokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang PTRLHK tidak tersusun tepat waktu	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar menyampaikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev sesuai jadwal yang ditentukan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi terkait hasil evaluasi capaian program dan kegiatan melalui monev secara kontinyu dengan OPD mitra	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN
88	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan KehutananImplementasi perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial belum dilakukan secara optimal	R.4Perencanaan 2024 belum optimal dapat mengatasi permasalahan yang menjadi isu di masing-masing OPD MitraKualitas dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang PTRLHK belum tersusun secara optimal	C	Menyampaikan kepada OPD mitra agar dalam menyiapkan rencana kerja tahun n+2 lebih awal	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN
89	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027keterbatasan data/dokumen	R.5keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa konsultansiKualitas dokumen KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 tidak sesuai yang diharapkan	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD mitra subid pertanian dan kelautan	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan OPD mitra terkait rencana kerja tahun n+2 untuk lebih awal	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNGJAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
90	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022Data terupdate dari masing-masing Bidang pada OPD Mitra belum lengkap terkompilasi dalam satu dokumen data	R.6Penyampaian update data hasil monitoring capaian program OPD Mitra terlambatDokumen hasil monitoring capaian program OPD Mitra Subbidang PTRLHK Tahun 2022 tidak tersusun tepat waktu	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap penanganan RAD-PG	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi dan verifikasi updating data secara kontinyu dengan OPD Tim Monev RADPG	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN
91	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021Hasil pengolahan data capaian program dan kegiatan yang disertai data pendukung melalui monitoring dan evaluasi dari OPD Mitra terlambat	R.7Penyampaian data capaian program dan kegiatan yang disertai data pendukung sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Bidang Sarana Prasarana Subbid PTRLHK Tahun 2021 terlambatdokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang PTRLHK Tahun 2021 tidak tersusun tepat waktu	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan penyedia jasa konsultansi	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi secara kontinyu dengan stakeholder terkait pembangunan pangan dan gizi	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN
92	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021	...Masih ada aksi mitigasi yang belum dilakukan verifikasi oleh Sekretariat PPRK dalam sistem AKSARA	R.8Verifikasi yang dilakukan Sekretariat PPRK terhadap data penurunan emisi gas rumah kaca tidak sesuai jadwal yang ditentukanDokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 tidak tersusun sesuai jadwal	C	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan penyedia jasa konsultansi dan stakeholder	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan penyedia jasa konsultansi	2	3	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN
93	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021	...Masih ada aksi mitigasi penurunan emisi GRK yang belum dilakukan verifikasi oleh Sekretariat PPRK dalam sistem AKSARA yang dapat menambah nilai penurunan emisi GRK	R.9	...Data yang berkontribusi dalam penurunan emisi GRK belum diperhitungkan semua sebagai nilai penurunan emisi GRKKualitas dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 belum sesuai target yang diharapkan		melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan penyedia jasa konsultansi dan stakeholder	3	3	9	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	melakukan koordinasi dan verifikasi updating data secara kontinyu dengan OPD Tim Monev RADPG	3	2	6	SEDANG	Subkoordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
94	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Data dasar dari PDRB belum tersedia secara lengkap untuk penghitungannya dan masih perlu rekonsiliasi dengan pusat	R.1	Sebagian data yang digunakan untuk analisis tidak tersedia tepat waktu	Penyusunan dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY tidak selesai tepat waktu	UC	Melakukan koordinasi pada pihak-pihak penyedia data	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Mencari alternatif untuk mendapatkan data secara maksimal	1	2	2	RENDAH	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN
95	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Data yang digunakan untuk analisis (PDRB dan ICOR) juga tidak tepat waktu	R.2	Sebagian data yang digunakan untuk analisis tidak tersedia tepat waktu	Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY tidak selesai tepat waktu	UC	Melakukan koordinasi pada pihak-pihak penyedia data	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Mencari alternatif untuk mendapatkan data secara maksimal	1	2	2	RENDAH	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN
96	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	kurangnya pemahaman terhadap data yang dibutuhkan	R.3	terjadi kesalahan pada proses pengambilan data	Penyediaan data statistik sektoral perencanaan dan pengendalian tidak sinkron	UC	Melakukan koordinasi dengan wali data pendukung dan produsen data	2	2	4	RENDAH	TERIMA	Melakukan Verifikasi data yang diberikan oleh produsen data dan walidata pendukung	1	2	2	RENDAH	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN
97	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	kurangnya pemahaman terhadap data yang dibutuhkan	R.4	terjadi kesalahan pada proses pengambilan data	Penyediaan data statistik sektoral perencanaan dan pengendalian tidak sinkron	UC	Melakukan koordinasi dengan wali data pendukung dan produsen data Geospasial	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Melakukan Verifikasi data yang diberikan oleh produsen data dan walidata pendukung	1	2	2	RENDAH	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN
98	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Update aplikasi Jogja dataku	Sedang ada pemeliharaan server	R.5	Aplikasi Jogja Dataku down dan tidak dapat diakses	Penyajian dan deseminasi data statistik untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring pembangunan menjadi terhambat	UC	Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan konsultasi teknis dengan Diskominfo	3	3	9	TINGGI	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Memindahkan server ke Diskominfo yang lebih baik daya dukung nya	2	3	6	SEDANG	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN
99	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan dan penyajian data statistik	Proses pengumpulan data di OPD/ Instansi Vertikal kurang efektif	R.6	Data yang disediakan secara resmi (dientry di dalam Dataku) oleh produsen data tidak tepat waktu	Penyajian data statistik sektoral perencanaan dan pengendalian tidak tepat waktu	UC	Melakukan koordinasi dan desk 3 bulanan dengan walidata pendukung dan produsen data statistik	1	3	3	RENDAH	TERIMA	Memberikan reward dan punishment bagi produsen data	1	2	2	RENDAH	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN
100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan dan penyajian data geospasial	Proses pengumpulan data di OPD/ Instansi Vertikal kurang efektif	R.7	Data yang disediakan secara resmi (dientry di dalam Geoportal) oleh produsen data tidak tepat waktu	Penyajian data geospasial perencanaan dan pengendalian tidak tepat waktu	UC	Melakukan koordinasi dan desk 3 bulanan dengan walidata pendukung dan produsen data geospasial	1	3	3	RENDAH	TERIMA	Memberikan reward dan punishment bagi produsen data	1	2	2	RENDAH	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Fasilitasi Satu Data Indonesia: a.) Dokumen Proyeksi Data	Sampel yang diambil tidak maksimal	R.8	Sebagian data untuk penyusunan proyeksi data tidak valid	Penyusunan Dokumen Proyeksi Data kurang berkualitas	UC	Melakukan koordinasi pada pihak-pihak penyedia data	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Menambah series data dan Melakukan Verifikasi data yang diberikan oleh produsen data dan walidata pendukung	2	2	4	RENDAH	Seksi Data dan Statistik	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen hasil penelitian dengan tema sosial : Ketimpangan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota	proses analisis dan pembahasan tidak tepat waktu.	R.1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh peneliti	Penelitian tidak selesai tepat waktu	UC	Koordinasi dengan tim peneliti	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Pemantauan progres penelitian secara rutin	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen hasil penelitian dengan tema sosial : Ketimpangan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota	Keterbatasan personil peneliti sesuai kepakaran yang dibutuhkan dalam penelitian.	R.1	proses pengumpulan data, analisis dan pembahasan tidak optimal	Kualitas hasil penelitian belum sesuai dengan yang diharapkan	UC	Memanfaatkan personel di luar Fungsional Peneliti	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Melakukan koordinasi secara berkala dengan personel di luar fungsional peneliti	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
104	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen Hasil Penelitian dengan Tema Budaya : Menuju DIY sebagai Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara	proses analisis dan pembahasan tidak tepat waktu.	R.2	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh peneliti	Penelitian tidak selesai tepat waktu	UC	Koordinasi dengan tim peneliti	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Pemantauan progres penelitian secara rutin	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
105	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen Hasil Penelitian dengan Tema Budaya : Menuju DIY sebagai Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara	Keterbatasan personil peneliti sesuai kepakaran yang dibutuhkan dalam penelitian.	R.2	proses pengumpulan data, analisis dan pembahasan, serta penyusunan laporan akhir tidak tepat waktu	Penelitian tidak selesai tepat waktu	UC	Memanfaatkan personel di luar Fungsional Peneliti	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Melakukan koordinasi secara berkala dengan personel di luar fungsional peneliti	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
106	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Inventarisasi Hasil penelitian Tahun 2022	Data hasil kegiatan penelitian belum terkompilasi oleh OPD, Perguruan Tinggi, maupun instansi vertikal di DIY	R.3	Penyampaian data hasil kegiatan penelitian dari OPD, Perguruan Tinggi, maupun instansi vertikal di DIY tidak sesuai jadwal	Inventarisasi hasil penelitian tidak selesai tepat waktu	UC	Melakukan Koordinasi Rutin Untuk Meminta OPD, Perguruan Tinggi, dan instansi vertikal melaporkan Hasil Kegiatan Penelitiannya	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Mensosialisasikan pengumpulan inventarisasi hasil penelitian kepada stakeholder terkait	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
107	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Inventarisasi Hasil penelitian Tahun 2022	OPD, Perguruan Tinggi, maupun instansi vertikal di DIY tidak melaporkan hasil kegiatan penelitiannya ke BPPSD	R.3	Data hasil kegiatan penelitian tidak diperoleh secara lengkap dari OPD, Perguruan Tinggi, maupun instansi vertikal di DIY	Hasil penelitian tidak terinventarisir seluruhnya	UC	Melakukan Koordinasi Rutin Untuk Meminta OPD, Perguruan Tinggi, dan instansi vertikal melaporkan Hasil Kegiatan Penelitiannya	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Koordinasi intensif dengan OPD, Perguruan Tinggi, dan instansi vertikal melalui media telekomunikasi	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
108	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Rekomendasi Hasil penelitian Tahun 2022	Penyampaian data hasil kegiatan penelitian dari OPD, Perguruan Tinggi, maupun instansi vertikal di DIY tidak sesuai jadwal	R.4	Inventarisasi hasil penelitian tidak berjalan tepat waktu	Rekomendasi hasil penelitian terlambat diajukan	UC	Menyusun Rekomendasi Hasil Penelitian lebih awal	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Menyampaikan rekomendasi hasil penelitian kepada pengambil kebijakan	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
109	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Rekomendasi Hasil penelitian Tahun 2022	Penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan isu maupun permasalahan pembangunan daerah	R.4	Rekomendasi hasil penelitian tidak selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Kurangnya rekomendasi hasil penelitian yang akan diajukan sebagai referensi dalam perencanaan	UC	Melakukan Koordinasi dengan Bidang Perencanaan melalui rapat-rapat koordinasi	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Koordinasi intensif dengan OPD, Perguruan Tinggi, dan instansi vertikal melalui media telekomunikasi	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA SUB KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN / OUTPUT SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
110	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Laporan Monev Kelitbangan Tahun 2022	Kompilasi data kegiatan kelitbangan pada instansi penyelenggara kelitbangan kabupaten/kota membutuhkan waktu yang lama	R.5	Penyampaian data kegiatan kelitbangan di instansi penyelenggara kelitbangan kabupaten/kota tidak sesuai jadwal	Dokumen laporan Monev Kelitbangan 2022 tidak selesai tepat waktu	UC	Melaksanakan monev ke Kab/Kota untuk meminta data monev kelitbangan	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Menjalin koordinasi intensif melalui media telekomunikasi dengan Litbang Kab/Kota untuk melaporkan hasil kelitbangannya kepada Litbang Provinsi	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
111	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Laporan Monev Kelitbangan Tahun 2022	Data mengenai pelaksanaan dan hasil kelitbangan belum secara lengkap diberikan oleh Instansi penyelenggara kelitbangan di provinsi dan Kabupaten/Kota	R.5	Data mengenai pelaksanaan dan hasil kelitbangan belum secara lengkap diperoleh	Dokumen laporan Monev Kelitbangan 2022 tidak dapat dicetak dengan informasi yang lengkap	UC	Melaksanakan monev ke Kab/Kota untuk meminta data monev kelitbangan	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Menjalin koordinasi intensif melalui media telekomunikasi dengan Litbang Kab/Kota untuk melaporkan hasil kelitbangannya kepada Litbang Provinsi	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
112	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan	proses analisis dan pembahasan tidak tepat waktu.	R.6	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh dewan penelitian dan pengembangan	Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan tidak tersedia tepat waktu	UC	Melakukan kordinasi dengan dewan penelitian dan pengembangan	2	3	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Menjalin koordinasi intensif melalui media telekomunikasi dengan dewan penelitian dan pengembangan	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
113	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan	Perumusan bahan kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan potensi, peluang maupun permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh penyelenggara kelitbangan	R.7	Rumusan bahan kebijakan tidak selaras dengan arah kebijakan kelitbangan	Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan tidak dapat dijadikan referensi	UC	Melakukan kordinasi dengan stakeholder	3	2	6	SEDANG	PINDAHKAN RISIKONYA	Membantu menyediakan data pendukung dari stakeholder	2	2	4	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
114	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Publikasi Prosiding Ilmiah	Penulisan artikel membutuhkan waktu yang lebih lama	R.7	Kurangnya jumlah artikel hasil penelitian yang dikumpulkan	Prosiding ilmiah tidak dapat dipublikasikan tepat waktu	UC	Melakukan koordinasi dengan para kontributor	2	2	4	RENDAH	TERIMA	Menjalin koordinasi intensif melalui media telekomunikasi dengan para	1	2	2	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN
115	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Publikasi Prosiding Ilmiah	Tema penelitian kurang sesuai dengan lingkup DIY	R.7	Artikel yang ditulis tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Prosiding ilmiah tidak dapat dijadikan referensi dalam proses perencanaan	UC	Sosialisasi kegiatan prosiding lebih awal	2	2	4	RENDAH	TERIMA	Sosialisasi Rencana Induk Kelitbangan Supaya peneliti dapat menyesuaikan tema	1	2	2	RENDAH	Seksi Penelitian dan Pengembangan	1 TAHUN ANGGARAN

